

**ETNISITAS SITUASIONAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS POLITIK
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN 2020**

Khairunnisah Lubis¹, Beltahmamero Simamora², Sry Reski Mulka³

Program Studi Administrasi Publik^{1,2}, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area,

Program Studi Ilmu Pemerintahan³, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman

Email: khairunnisah@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus mengkaji peran etnisitas situasional terhadap identitas politik pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Simalungun di tahun 2020 lalu. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini peran etnisitas yang mengalami penguatan dalam proses politik identitas di kancah pemilihan kepala daerah. Konstalasi Politik yang terjadi di Kabupaten Simalungun didasari oleh emosi struktural. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi kasus. Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Desa Adil Makmur Huta III. Kecamatan bosar Maligas. Kabupaten Simalungun. Sumber data diperoleh dari masyarakat, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tim sukses dari pencalon bupati tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilih memilih kandidat berdasarkan suku, agama dan ras. Memasangkan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki keragaman dalam suku, agama dan ras merupakan upaya tertinggi dalam proses etnisitas situasional dalam polarisasi politik identitas. Keadaan ini dibuktikan dengan fakta kepala daerah di Kabupaten Simalungun selalu dijabat oleh suku Simalungun yang agama dan ras nya juga dominan selama pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005.

Kata Kunci : Politik Identitas, Etnisitas Situasional, Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This study focuses on examining the role of situational ethnicity in political identity in the regional head election in Simalungun Regency in 2020. The background of this writing is the strengthening of the role of ethnicity in the process of identity politics in the regional head election arena. head election. The political constellation that occurs in Simalungun Regency is based on structural emotions. This research is a qualitative research with the type of case study. The location or object in this research is in Adil Makmur Huta III Village. Maligas district is bosar. Simalungun Regency. Sources of data were obtained from the community, the head of the Voting Organizing Group (KPPS) and the success team for the candidate for regent. The results of this study indicate that voters choose candidates based on ethnicity, religion and race. Pairing candidates for regent and deputy regent who have ethnic, religious and racial diversity is the highest effort in the ethnic situasional process in the polarization of identity politics. This situation is evidenced by the fact that the regional head in Simalungun Regency has always been held by the Simalungun tribe whose religion and race have also been dominant in regional head elections since 2005.

Keywords : Identity Politics, Situational Ethnicity, Regional Head Election

PENDAHULUAN

Lahirnya politik identitas merupakan proses menciptakan kelompok- kelompok mayoritas dan minoritas dalam suatu wilayah. Politik identitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pengakuan bahwa di Indonesia terdapat banyak perbedaan baik itu etnis, suku, budaya, agama dan lain sebagainya Oleh karena itu, politik identitas (Sukamto, 2010) selalu saja menguntungkan bagi kelompok mayoritas khususnya dalam sewaktu pemilihan umum. Politik identitas merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para pelaku politik dan dapat juga dikatakan alat berpolitik yang paling utama. Keberagaman etnis dalam Negeri ini menjadi suatu keistimewaan, namun juga dapat menjadi boomerang tersendiri dalam dunia politik khususnya sering digunakan dalam pemilihan umum untuk mendapat suara sebanyak mungkin dengan mengatas namakan etnis dan menjadi jalan pintas untuk meraup suara sebanyak- banyaknya dengan mengedepankan etnis. Terlalu kasar jika terdengar kalimat bahwa etnisitas digunakan untuk membodohi masyarakat dan para peserta pemilu bersembunyi dibalik etnis yang digunakan sebagai symbol jati diri dalam suatu kelompok dan justru sebagai bentuk perlawanan dan kekuatan untuk memenangkan pemilihan umum yang dilakukan.

Dari beberapa ciri-ciri yang menunjukkan adanya politik identitas, etnis adalah salah satu segi atau bagian yang paling berpengaruh serta menonjol diantara kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam pengertian politik identitas. Maka dari itu, penelitian kali ini lebih menitik beratkan persoalan pada segi etnis. Hal ini dikarenakan bahwasanya kesamaan etnis adalah kekuatan yang digunakan oleh para pelaku politik untuk mencari simpatik dan mendapat dukungan maupun suara dari masyarakat terkhusus yang memiliki banyak persamaan. Oleh karena itu, kekuatan etnis (Astuti, 2014) adalah kekuatan politik yang paling dipentingkan oleh para pihak politik yang terlibat. Dengan kesamaan etnik tersebut para pelaku politik sebut saja para pencalon politik dalam pemilihan umum akan berkesempatan dan berpeluang besar untuk memenangkan pemilihan umum.

Oleh karena itu, politik identitas dapat merugikan calon yang berasal dari kelompok minoritas karena otomatis suara yang didapat kemungkinan besar juga akan lebih sedikit. Dalam teori yang tertera pada pertemuan perkuliahan ke-8 yakni terkait “etnisitas” dijelaskan bahwa etnis adalah orang-orang dalam kelompok dan juga segolongan rakyat yang dianggap mempunyai hubungan biologis. Sedangkan etnik adalah kelompok orang-orang, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan ethnosidentik dengan dasar geografis dalam suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu. Teori etnis terbagi menjadi

teori situasional, teori primordial dan teori relasional. Kelompok etnis seseorang tidak bisa direnggut, tidak bisa disangkal dan tidak dapat ditolak. Konsep etnisitas adalah konsep tentang asal-usul sosial yang bersifat relasional. Etnisitas merupakan proses hubungan dan tidak bersifat isolasi. Etnisitas menjadi aspek yang penting dalam hubungan politik (Agustino, 2004). Jadi, etnisitas muncul dalam kerangka hubungan relasional, dalam interaksi dengan dunia luar dan komunitas kelompoknya. Dalam penelitian kali ini, akan mencari korelasi fenomena pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Simalungun dengan etnisitas situasional, dimana etnisitas situasional mendasarkan pada pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan antara dua etnisitas atau lebih yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang telah dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan pada batas-batasnya. Kesamaan-kesamaan yang ada pada dua atau lebih entitas yang disatukan akan menjadi identitas etnik. Menurut perspektif etnisitas situasional ini, etnik ada karena adanya hubungan antara entitas yang berbeda.

Proses pemilihan umum dari tingkat nasional hingga daerah sering sekali bermain peran dengan menciptakan politik identitas, hal ini mengakibatkan sistem politik di Indonesia semakin menguat dan beradu. Seperti di Kabupaten Simalungun, pemilihan kepala daerah sering sekali mengedepankan suku, agama dan ras dari kandidat kepala daerah. Walaupun tidak dipungkiri ketokohan kandidat dan dukungan partai politik juga menjadi tolak ukur kemenangan kepala daerah namun hal tersebut tidak menjadi indikator utama. Menciptakan situasional etnis menjadi kunci dalam komunikasi politik di pemilihan Bupati Kabupaten Simalungun.. Politik identitas merupakan suatu alat untuk menunjukkan jati diri dari kelompok tertentu. Pada pelaksanaan pemilihan umum yang mengedepankan aspek politik identitas melalui etnis situasional seringkali berakhir dengan sentimen terhadap suku agama dan ras tertentu. Tentunya hal ini dapat menjadi masalah yang akhirnya berdampak negatif karena ada upaya untuk mendiskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Pada dasarnya kelompok minoritas menjadi kelompok yang sering dikucilkan dan dirugikan. termasuk suara khususnya sewaktu dalam pemilihan umum. Kelompok minoritas sendiri juga menganggap bahwa keberadaan mereka tidak terlalu dihiraukan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2005, preferensi peta kontestasi tidak banyak berubah. Isu primordial menjadi jargon dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Pemilih sudah membuat peta untuk memilih kandidat dengan rumusan turun-temurun berdasarkan suku, agama dan ras.

Tentunya ini tidak sama dengan pola strategi yang dimainkan di level nasional. Beberapa ahli mengemukakan bahwa etnitas tidak menjadi indikator utama dalam mendulang suara. (William Liddle & Saiful Mudjani, 2007)

Sering bertambahnya jumlah populasi maka semakin beragam suku, agama dan ras di Kabupaten Simalungun. Demi menciptakan etnistas situasional yang selalu berhasil menghantarkan calon kepala daerah menjadi kepala daerah maka strategi baru yang dibentuk dalam kampanye adalah penyatuan antara calon dan wakil calon bupati di Kabupaten Simalungun. Penyatuan pasangan melalui perbedaan yang sering dikenal dengan istilah pelangi ini dimulai dengan pasangan yang berbeda suku, agama dan ras oleh masing-masing kandidat calon bupati dan wakil calon bupati. Kabupaten Simalungun pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 memiliki kandidat yang later belakangnya berbeda suku, agama dan ras. Strategi yang dimainkan dalam Pemilihan di Kabupaten Simalungun lebih menitikberatkan pada orientasi ideology menekankan pada bidang subjektivitas seperti kekerabatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian Studi Kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana metode keberhasilan penggabungan entitas yang berbeda dalam pemilu. Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Desa Adil Makmur Huta III. Kecamatan Bosar Maligas. Kabupaten Simalungun. Dengan demikian penulis menganggap lokasi ini sudah strategis-representatif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : masyarakat, ketua KPPS dan Tim sukses dari pencalon Bupati tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Politik Identitas

Politik Identitas Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada 3 pendekatan pembentukan identitas (Abdillah, 2002) yaitu: Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. Bersamaan dengan perkembangan zaman, politik identitas semakin melekat dan menyala kuat dalam seputar dunia perpolitikan. Terlebih khusus sangat dibutuhkan dalam proses pemilihan umum. Politik identitas merupakan suatu simbol dalam jati diri kelompok tertentu dan merupakan bentuk keanekaragaman dari dalam negeri ini. Keragaman agama, suku, budaya serta etnis ternyata dapat melahirkan cara berpolitik. Keanekaragaman tersebut dapat juga disebut sebagai perbedaan yang menjadi keistimewaan tersendiri namun juga dapat mempengaruhi segi politik dalam negeri ini terkhusus dalam proses pemilihan umum. Menurut (Abdillah, 2002) Politik identitas merupakan bagian dari politik yang memfokus utamakan dan mengkaji permasalahan mengenai perbedaan- perbedaan didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu, yakni diantaranya asumsi fisik tubuh, primordialisme, keyakinan, pertentangan agama, bahasa maupun politik etnisitas. Sedangkan menurut (Sukanto, 2010) secara teoritis politik identitas merupakan cara politik dengan mengedepankan kepentingan - kepentingan dari anggota-anggota kelompok atas dasar kesamaan karakteristik dan identitas, baik itu ras, keagamaan, gender maupun etnisitas.

Dari beberapa kasus, terlihat bahwa politik identitas hadir dan digunakan dalam membangun citra diri untuk mendapatkan dukungan serta meraup jabatan melalui jalan pintas dengan cara mengedepankan kesamaan-kesamaan yang menonjol dalam diri para pelaku kepentingan politik. Di samping itu, politik identitas juga lekat dengan istilah sentiment kedaerahan yang berbau isu “putra daerah” yakni sebuah pembeda dan menjadi pembatas antara penduduk asli dan penduduk pendatang. (Agustino, 2004). Dari segi keetnisan, politik identitas etnis menonjol dengan adanya symbol dalam upaya memasukkan nilai-nilai keetnisan yang dapat menarik simpatik masyarakat melalui cara-cara tertentu, seperti memperlihatkan nilai-nilai kesamaan yang terdapat dalam diri para pelaku kepentingan politik atau elite politik tersebut.

Permasalahan terdominasi oleh kelompok atau etnis mayoritas terhadap kelompok minoritas. Secara umum, tersimpulkan bahwa instrumen politik identitas terkait segi etnisitas memiliki peranan penting dalam menuju kemenangan pemilihan umum. Kandidat atau para pelaku kepentingan politik akan dengan mudah mendapatkan dukungan serta suara yang banyak pada saat proses pemilihan. Permasalahan ini yang dinilai dapat mempengaruhi berjalannya perpolitikan dalam suatu negara. Berikut ada beberapa hal yang berhubungan dengan politik identitas (Astuti, 2014) yaitu :

- a) Agama
- b) Etnis
- c) Penampilan
- d) Arena identitas

Politik identitas pada dasarnya sesuatu hal yang lumrah atau sah dilakukan. Karena dengan adanya politik identitas terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki ragam agama, budaya, etnis dan lainnya. Dengan adanya politik identitas, dinilai bahwa adanya pengakuan tentang perbedaan dan keanekaragaman tersebut. Namun, di segi lain politik identitas akan menjadi masalah apabila :

- a) Kandidat dalam pemilu meletakkan sebuah bangunan narasi yang mengucilkan kandidat lain.
- b) Identitas menjadi kekeliruan dalam politik identitas
- c) Ucapan yang lalai.
- d) Penggunaan kalimat yang keliru.
- e) Budaya yang keliru (tidak sama).
- f) Kekeliruan kandidat dalam menempatkan identitas tidak tepat menjadi tidak bermakna dan tidak berkontribusi positif lagi.
- g) Muncul ketidakpercayaan, rasa curiga yang mengganggu keseimbangan sosial.
- h) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tidak ada kelompok yang dirugikan, disakiti dan dikucilkan, politik identitas sah dilakukan.

Pada pemilihan Bupati di Kabupaten Simalungun juga terjadi adanya penggabungan antara dua entitas yakni Bapak Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan Bapak Zonny Waldi berhasil memenangkan pertarungan dalam pemilu. Penggabungan kedua etnik tersebut ternyata berhasil menyatukan suara yang banyak. Hal ini terbukti bahwa dengan bersatu meskipun berbeda suku maupun ras itu ternyata dapat berdampak positif bagi pemilihan dan berakhir dengan kemenangan. Dimana keadaan strategis pada Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, memang masyarakatnya atau pencoblos mayoritas beragama muslim dan berasal dari suku Jawa dan suku Batak. Jadi, tidak heran jika dalam suatu politik etnik yang merangkul kedua perbedaan suku adat dapat

menghasilkan suara yang maksimal. Penggabungan antara kedua entitas tersebut melahirkan suatu kekuatan yang amat berdampak sebagai kekuatan untuk menggabungkan kedua entitas menjadi suara yang amat besar pada pemilihan tersebut. Keberhasilan kemenangan ini disinyalir sebagai keberhasilan politik identitas etnik yang terjadi dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Simalungun. Relasi dalam politik juga dibutuhkan, tidak hanya mengandalkan stakeholders yang ia miliki. Karena pada dasarnya, masyarakat akan memilih dan melihat dari siapa yang memiliki kesamaan dengan mereka pribadi. Penelitian ini dilakukan guna mendalami juga membuktikan kebenaran akan pengaruh etnik dapat mempengaruhi berlangsungnya kemenangan dalam perspektif politik identitas melalui pemilihan umum yang terjadi.

Perspektif Etnisitas

Pada saat ini, kajian tentang etnisitas berkaitan erat dengan kajian identitas. Etnisitas yang beragam membuktikan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara yang plural. Politik identitas di Indonesia, lebih bermuatan etnisitas. Indonesia terkenal dengan keberanekaragaman budaya. Istilah etnisitas sendiri berasal dari kata etnis atau jika dalam budaya dan dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan kata etnos. Yang pada dasarnya etnisitas adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu, yakni persamaan biologis dan budaya serta melakukan tindakan dengan pola tindakan yang sama. Menurut ahli (Liliweri, 2005) ada beberapa konsep tentang etnisitas. Diantaranya adalah :

- a) Etnik (*ethnic*) berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dikenal dengan kata “*ethnichos*” yang secara harfiah memiliki arti keberadaan suatu kelompok penyembah berhala atau biasa disebut dengan istilah kafir. Kemudian, seiring dengan perkembangannya, istilah etnik condong pada suatu kelompok yang fanatik dengan ideologinya. Para ahli sosial menyatakan bahwa etnik merupakan sekelompok penduduk yang memiliki persamaan-persamaan, seperti perilaku budaya, karakteristik budaya, sejarah, adat istiadat serta bahasa.
- b) Etnisentrisme (*ethnocentrism*) merupakan bentuk sikap emosional suatu kelompok etnis, agama, suku bangsa, agama maupun kelompok yang merasa bahwa kelompoknya paling waw.
- c) Etnisitas (*ethnicity*) mengacuh pada penggolongan etnis berdasarkan afiliasi.
- d) Etnografi (*ethnography*) merupakan kajian bidang antropologi yang secara deskriptif mempelajari suatu kelompok etnik tertentu.

(Barth, 1969) dan (Zastrow, 1999) berpendapat bahwa etnis adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan visi maupun misi serta tujuan yang sama baik melalui asal-usul

bangsa, ras, agama yang dianutnya. Kelompok etnis memiliki 6 sifat, yakni sebagai berikut :

- a) Mempunyai nama khas yang mengidentifikasi hakikat dari suatu masyarakat.
- b) Mempunyai rasa solidaritas dari penduduknya.
- c) Memiliki kesatuan elemen-elemen budaya, seperti bahasa, adat istiadat dan agama.
- d) Terikat dengan suatu ikrar tanah tumpah darah yang sama.
- e) Memiliki suatu sejarah masalah yang sama.
- f) Mempercayai mitos akan kesatuan nenek moyang yang sama.

Jadi, dari sifat-sifat etnis diatas dapat disimpulkan bahwa etnis dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kelompok yang terbentuk atas dasar persamaan karakteristik yang sifatnya lebih ke “kebudayaan”. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa konsep etnis, sifat cakupannya jauh lebih besar daripada ras, kemudian ras juga termasuk dalam bagian dari etnis (Belakang, 2010)

Etnisitas Situasional dalam Pembentukan Identitas Politik

Perspektif Barth mengilhami banyak ahli untuk meneliti apa yang disebut sebagai etnisitas situasional, yaitu bagaimana identitas etnik digunakan individu-individu dalam interaksi mereka dengan orang lain. Mereka menganggap identitas etnik sebagai dinamik, cair, situasional sebagaimana ditunjukkan (Mulyana, 2011) yang dimana menunjukkan bagaimana identitas etnik dan lambang-lambanganya dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sosial, ekonomi, dan politis tertentu.

Keberadaan suatu etnis dalam perspektif politik identitas sangatlah berperan penting terutama dalam kasus pemilihan umum. Etnisitas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses kemenangan kandidat. Partisipasi politik adalah suatu indikator dalam cakupan ruang lingkup negara yang menerapkan sistem demokrasi. Yang dimana pada sistem ini, masyarakat dibebaskan untuk memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Menurut (Agustino, 2004) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia, salah satunya adalah etnisitas. Besarnya peranan etnis dalam membentuk sikap, orientasi dan persepsi seseorang dalam menentukan pilihannya. Dengan adanya rasa persamaan kesukuan atau kedaerahan dapat mempengaruhi dukungan seseorang dalam memilih kandidat pada saat pemilihan umum (Muhammad, 2006). Fenomena politik identitas sendiri sering menggunakan primordial, seperti etnis, suku, ras dan agama kedalam ranah politik. Bisa dengan menggunakan identitas sosial dan identitas lainnya yang melekat pada diri kandidat

agar mendapatkan suara atau dukungan terbanyak hanya dengan menonjolkan jati diri berasal dari kelompok mana seorang tersebut. Kandidat yang berasal dari golongan etnis mayoritas akan cenderung memiliki kesempatan menang dalam pemilihan umum tersebut. Sedangkan kandidat yang berasal dari kelompok minoritas akan memiliki peluang yang lebih sedikit dalam pemilihan umum. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat atau pemilih lebih mengutamakan dan mengedepankan persamaan-persamaan tertentu, termasuk itu etnis. Hal inilah yang dapat merugikan kandidat yang berasal dari kelompok minoritas pada dasarnya akan kalah pada saat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Fenomena keberhasilan etnik situasional dalam mempoliriasi politik identitas pada pemilihan Bupati di Kabupaten Simalungun juga terjadi adanya penggabungan antara dua entitas yakni Bapak Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan Bapak Zonny Waldi berhasil memenangkan pertarungan dalam pemilu. Penggabungan kedua etnik tersebut ternyata berhasil menyatukan suara yang banyak. Hal ini terbukti bahwa dengan bersatu meskipun berbeda suku maupun ras itu ternyata dapat berdampak positif bagi pemilihan dan berakhir dengan kemenangan. Dimana keadaan strategis pada Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, memang masyarakatnya atau pencoblos mayoritas beragama muslim dan berasal dari suku Jawa dan suku Batak. Jadi tidak heran jika dalam suatu politik etnik yang merangkul kedua perbedaan suku adat dapat menghasilkan suara yang maksimal. Penggabungan antara kedua entitas tersebut melahirkan suatu kekuatan yang amat berdampak sebagai kekuatan untuk menggabungkan kedua entitas menjadi suara yang amat besar pada pemilihan tersebut. Keberhasilan kemenangan ini disinyalir sebagai keberhasilan politik identitas etnik yang terjadi dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Simalungun.

Relasi dalam politik juga dibutuhkan, tidak hanya mengandalkan stakeholders yang ia miliki. Karena pada dasarnya, masyarakat akan memilih dan melihat dari siapa yang memiliki kesamaan dengan mereka pribadi. Penelitian ini dilakukan guna mendalami juga membuktikan kebenaran akan pengaruh etnik dapat mempengaruhi berlangsungnya kemenangan dalam perspektif politik identitas melalui pemilihan umum yang terjadi. Hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa dalam kasus ini dapat dikatakan keadaan fakta lapangan yang dilatarbelakangi politik identitas. Dalam kasus ini, tercium aroma fakta yang menjadikan agama dan etnis sebagai suatu cara jalan politik identitas tersebut berlangsung.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etnistasi situasional merupakan pola mendasar dalam Politik identitas dalam mendulang suara. Aktifitas komunikasi politik sebagai indikator dalam berupaya memperkuat ketokohan calon-calon kepala daerah khususnya calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Simalungun, hal ini dapat dikatakan menjadi asistensi terjadinya eksploitasi identitas-identitas yang dimiliki. Seperti pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Simalungun, identitas yang diperkuat dengan jargon saat pelaksanaan kampanye menjadi sangat kontekstual dan situasional. Memasangkan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki keragaman dalam suku, agama dan ras merupakan upaya tertinggi dalam proses etnitas situasional dalam polarisasi politik identitas agar komunikasi politik yang terjadi dapat menarik simpati pemilih. Dari sini dapat diukur bahwasanya perspektif etnik situasional sangat menarik untuk mengamati dan memahami makna dibalik aktivitas politik identitas dan perilaku komunikasi politisi terutama pada daerah multietnik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed S (2002). Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas. Magelang, Indonesiatera
- Agustino, L (2004) Konflik dan pembangunan politik. Analisis CSIS Vol. 33(3):171-182.
- Asfar, Muhammad. (2006). Pemilu dan Perilaku Memilih. Pustaka Eureka. Surabaya.
- Astuti, Sri. (2014). Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Barth, Fredrich. (1969). Kelompok Etnik dan Batasannya. Terjemahan Nining L. Soesilo. Jakarta: UI Press.
- Deddy Mulyana. (2011). Ilmu Komunikasi. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Liddle, R. William dan Saiful Mujani. (2007). *“Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia”*. *Comparative Political Studies* 40(7)
- Liliweri, Alo. (2005). Prasangka dan Konflik (Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultur). Yogyakarta: Lkis)
- Sukamto. (2010). Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi “Lokalitas dan Globalisasi”). *Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang*. Vol.2 (46)

Zastrow, Charles. (1999). Introduction to Social Welfare Institutions (Social Problems, Services, and Current Issues). Fourth Edition. Homewood, Illinois: The Dorsey Press